



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yatusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yayasanman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969

ABSTRAK

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron**

AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

DDC: 320.5

Djuneidi

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?

Keywords: *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.

Keywords: *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: *democracy, cyber law, cyber democracy*

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: *decentralization, national identity, regional autonomy*

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

DDC: 320.5

Djuneidi

MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Meilinda Sari Yayusman

Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: m.s.yayusman@gmail.com

Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.). (2019). *Routledge Handbook of Diaspora Studies*. Routledge, New York, Amerika Serikat, hal. xviii +383.

PENGANTAR

Kajian mengenai diaspora terus berkembang dan mendapatkan banyak perhatian dari kalangan akademisi dan peneliti. Diaspora memiliki definisi yang semakin beragam terlebih dengan fenomena globalisasi yang menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam perkembangan konsep diaspora. Ruang dan batas yang semakin melebur karena kemajuan teknologi dan sistem transportasi mempengaruhi perkembangan konsep diaspora dan menggeser motif perpindahan penduduk ke luar negeri dari yang semula berbentuk paksaan menjadi sukarela. Transformasi pola interaksi dan motif perpindahan penduduk ini tidak dapat dipungkiri disebabkan oleh globalisasi yang berkembang di tahun 1980-an. Cardoso (2018) juga menjelaskan bahwa transformasi yang terjadi di dunia didorong oleh adanya globalisasi. Terlebih, pemerintahan dari negara-negara asal kini mulai memiliki perhatian lebih untuk para diaspora mereka yang berada di luar negeri. Pemerintah semakin menyadari bahwa peran diaspora adalah penting untuk pembangunan tanah air, sehingga segala potensi dan keahlian yang dimiliki oleh para diaspora diharapkan dapat dimaksimalkan dan dikonstruksikan untuk negara asal.

Buku berjudul *Routledge Handbook of Diaspora Studies* menjadi salah satu buku pedoman untuk mempelajari diaspora dan perkembangannya secara komprehensif. Menurut Cohen dan Fisher (2019), gagasan diaspora telah mendapatkan perhatian di banyak bidang ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial. Buku berjenis bunga rampai ini merupakan kumpulan tulisan dari para peneliti dan akademisi yang memiliki

fokus dalam perkembangan studi diaspora dari berbagai bidang keilmuan. Cohen dan Fisher sebagai editor berhasil memadupadankan kajian diaspora yang bersifat multidisiplin, yakni mencakup kajian dari sudut pandang antropologi, etnografi, sejarah, hubungan internasional, politik geografi, dan sosiologi. Tulisan di dalam buku ini saling melengkapi satu sama lain dan membantu para pembaca untuk memetakan perkembangan studi diaspora di dunia.

Buku ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama terdiri dari tulisan-tulisan mengenai sejarah dan perkembangan konsep diaspora. Bagian kedua membahas tentang kompleksitas internal yang perlu diperhatikan dalam studi diaspora, yakni terkait keberagaman etnis, keyakinan, dan bahasa ketika para diaspora bermukim di negara baru bagi mereka serta alasan-alasan mengapa orang bermigrasi ke negara lain. Bagian ketiga membahas tentang bagaimana mendefinisikan rumah dan tanah air atau seringkali disebut dalam buku ini *'home and homeland'* dalam studi diaspora serta bagaimana para diaspora memelihara hubungan dengan negara asal. Bagian keempat secara garis besar membahas tentang hubungan. Memelihara hubungan dengan negara asal menjadi bagian paling penting untuk para diaspora. Hubungan dalam bentuk remitansi ekonomi, sosial, dan politik menjadi bagian utama dalam diskusi ini. Pada bagian ini, juga diperkenalkan istilah *remitansi kolektif* yang diartikulasikan dalam organisasi yang dibentuk oleh diaspora untuk berkontribusi ke tanah air mereka. Remitansi ini dilakukan secara kolektif dengan perwujudan rasa cinta pada tanah air dan kegiatan-kegiatan yang pada umumnya bersifat

terlihat. Bagian terakhir menjadi bagian penutup dalam buku ini dengan inti pembahasan terkait kritik terhadap studi diaspora yang menekankan pada pentingnya untuk mengikat diaspora guna pembangunan negara asal.

Perkembangan konsep dan teori dari berbagai bidang keilmuan yang tentunya saling melengkapi, seperti dalam melihat konflik sebagai salah satu alasan menarik berkumpulnya diaspora, remitansi yang tidak lagi hanya dikaitkan dengan pengiriman uang dan pembentukan sebuah organisasi atau *'hometown transnationalism'* untuk berkontribusi ke negara asal di era globalisasi ini adalah beberapa pembahasan yang menarik untuk didiskusikan.

PERKEMBANGAN KONSEP DAN TEORI PADA STUDI DIASPORA

Perkembangan konsep diaspora tidak dapat terlepas dari sejarah yang cukup panjang. Perpindahan paksa yang dialami orang-orang Yahudi, Yunani, dan Armenia akibat konflik yang terjadi pada abad ketiga sebelum masehi menjadi awal mula istilah *diaspora* mulai disebutkan dalam artian sempit. Pada tahun 1930-an, istilah diaspora berkembang tidak lagi tentang orang-orang Yahudi, Yunani, dan Armenia yang berpindah, tetapi meluas menjadi jaringan yang tersebar secara paksa dari tanah air mereka. Alasan perpindahan diaspora hingga saat itu masih tentang perpindahan secara tidak sukarela, meskipun aktor yang berpindah tidak hanya tentang bangsa Yahudi, Yunani, dan Armenia. Berdasarkan perjalanan sejarah, Dufoix (2008) menjelaskan bahwa pada paruh kedua abad kedua puluh, penggunaan istilah diaspora mulai sering kali dikaitkan dengan “Diaspora Yahudi” atau seringkali disebut *the Jewish Diaspora* dan “Diaspora Berkulit Hitam” atau *the Black Diaspora*. Diaspora berkulit hitam banyak diperbincangkan karena adanya migrasi masif yang terjadi di kalangan bangsa Afrika pada pertengahan tahun 1960-an. Istilah diaspora terus berkembang dari berbagai bidang keilmuan yang kemudian menjadi sebuah konsep di tahun 1970-an (Dufoix, 2019) dan bergerak menjadi konsep yang modern di tahun 1980-an seiring dengan adanya fenomena globalisasi (Dufoix, 2008). Bahkan sampai dengan pertengahan

1980-an, diaspora masih digunakan dalam dua hal terpisah dan cara yang berbeda, yakni sebagai terma untuk menjelaskan populasi yang tinggal di luar wilayah teritori negara asal dan sebuah konsep spesial yang menjelaskan tentang jaringan perdagangan orang-orang Afrika (Dufoix, 2008).

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perpindahan orang, barang, dan jasa, sehingga konsep diaspora pun terus berkembang dan terus beradaptasi dengan adanya modernisasi. Seiring perkembangan konsep diaspora dalam kerangka modern tersebut, di tahun 1990-an, Safran (1991) menjelaskan bahwa diaspora, lebih spesifiknya, komunitas diaspora, seringkali digunakan sebagai istilah metaforis untuk beberapa kategori orang, yakni ekspatriat, pengusiran, pengungsi politik, penduduk asing, imigran, dan etnis serta ras minoritas. Pengertian ini dapat dikatakan membawa pengaruh signifikan dalam perluasan makna dari diaspora itu sendiri. Meskipun diskursus mengenai konsep diaspora masih terus berjalan, pandangan ini ternyata juga didukung oleh Tölölyan (2019) dengan pemahaman serupa bahwa diaspora telah berbagi dengan istilah-istilah lain seperti migran, ekspatriat, pengungsi, pekerja tamu, orang-orang yang diasingkan, komunitas yang ada di luar negeri, dan komunitas etnis. Cohen (1997, 2008) juga memberikan tipologi baru yang menjelaskan ‘tipe ideal’ diaspora, yakni korban, tenaga kerja, perdagangan, kekaisaran, dan budaya dengan memasukan elemen-elemen lain seperti alasan perpindahan yang tidak hanya dilakukan secara paksa, tetapi juga sukarela. Perkembangan ini tidak luput dengan segala kemudahan yang ada dalam sistem transportasi yang memudahkan perpindahan dan keinginan besar untuk mencari peruntungan guna kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Menggunakan pendekatan transnasionalisme sebagai pendekatan baru, diaspora dianggap sebagai bentuk spesifik dari komunitas transnasional yang secara konsep sebelumnya lebih menekankan pada pembentukan dan mobilisasi, kemudian berkembang pada ikatan dan praktik yang dilakukan (Faist, 2010). Diaspora dalam pendekatan transnasional sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi pada interaksi diaspora dan negara asalnya sekarang ini, yaitu dengan mengedepankan ikatan dalam bentuk

organisasi atau perkumpulan dan praktik yang dapat dilakukan untuk pembangunan negara. Dapat dikatakan pula bahwa konsep ini juga mencerminkan atas apa yang sedang diusahakan oleh pemerintah-pemerintah negara asal para diaspora, termasuk Indonesia. Berlandaskan atas keinginan untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, peran diaspora adalah penting. Untuk itu, dukungan dan respon positif pemerintah terhadap upaya yang dilakukan oleh diaspora dalam ikatan dan praktik untuk tanah air dikatakan dapat mempererat hubungan diaspora dengan negara asalnya, termasuk mendorong implementasi ilmu pengetahuan dalam proyek-proyek nyata dan transfer pengetahuan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia.

Konsep diaspora juga dilengkapi dengan berkembangnya pendekatan dan teori yang dapat digunakan dalam melakukan kajian diaspora, sehingga studi ini tidak melulu tentang mendefinisikan aktor yang disebut sebagai diaspora, tetapi juga menekankan pada proses dan pola interaksi para diaspora membentuk identitasnya. Hal-hal tersebut banyak dipelajari menggunakan kerangka-kerangka teoritis, seperti transnasionalisme, konstruksi sosial, dan perpindahan sosial. Dalam teori-teori ini, aspek mobilitas, komunitas, proses dan pembentukan identitas menjadi elemen utama dalam menjelaskan apa yang disebut sebagai diaspora. Misalnya, pendekatan konstruksi sosial menekankan bahwa diaspora bukanlah sesuatu yang bersifat bayangan atau *'imagined'*, tetapi diaspora dibangun secara sosial yang dalam prosesnya nilai-nilai identitas kolektif dibentuk (Turner, 2019). Interaksi dan identitas kolektif yang dibangun oleh para diaspora menjadi elemen penting dalam teori konstruksi sosial. Teori ini memperjelas bahwa sesuatu yang dibangun secara sosial memerlukan sebuah interaksi. Pendekatan ini berkesinambungan dengan apa yang didiskusikan dalam teori perpindahan sosial yang tidak terlepas dengan teori konstruksi sosial. Quinsaet (2019) menjelaskan teori perpindahan sosial terkait analisis mengenai diaspora yang perlu melihat hal-hal terkait mobilisasi sosial di mana mencakup interaksi politik yang dinamis antara negara pengirim dan penerima, relokasi dan reproduksi sumber daya sosial, politik,

dan budaya dari negara asal atau *'homeland'* ke negara penerima, dan proses loyalitas yang dibangun oleh para diaspora sebagai pondasi pembentukan identitas kolektif. Müller-Funk (2019) menambahkan dalam teori perpindahan sosial baru atau *new social movement theory*, yakni dua hal yang perlu dilihat dalam teori ini adalah tindakan dalam proses perpindahan sosial dan proses para diaspora membangun identitas kolektifnya. Proses perpindahannya menjadi hal yang penting dalam mengkaji diaspora lebih dalam.

DIASPORA AKIBAT KONFLIK

Secara keseluruhan, buku ini banyak menjelaskan perkembangan konsep diaspora dengan penafsiran positif, sehingga menjadi hal yang berbeda ketika membahas diaspora dari sudut pandang lain. Pada bab dua puluh tiga, kajian terkait komunitas diaspora yang terbentuk akibat konflik menjadi bagian yang menarik. Missbach (2019) membahas diaspora yang terbentuk karena adanya konflik yang didasari oleh adanya perasaan teraniaya dan menderita yang sama. Salah satu studi kasus yang dapat menjelaskan terbentuknya diaspora akibat konflik ini adalah orang-orang Maluku yang tergabung dalam kelompok tentara militer Belanda atau KNIL (*Koninklijk Nederlands Indische Leger*). Mereka diterbangkan ke Belanda untuk dilepaskan status tentaranya dan dijanjikan untuk dipulangkan kembali ke Indonesia. Namun, janjinya untuk dipulangkan ke Indonesia tidak kunjung dipenuhi. Konflik kepentingan politik antarnegara dapat dikatakan menjadi salah satu alasan mengapa kepulangan diaspora Maluku menjadi masalah, sehingga para diaspora berkumpul untuk menunjukkan sikap resistensi kepada Belanda yang dilatarbelakangi kesamaan nasib dan perasaan untuk pulang.

Dalam sejarah perpindahan orang-orang Maluku ke Belanda, bermula dari Indonesia yang semakin kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan memaksa Belanda untuk membebaskan daerah kekuasaannya pada 28 Desember 1949 (van Amersfoort, 2007). Pro-kontra kemerdekaan terjadi di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Maluku, yakni pada sebagian orang-orang Maluku, khususnya yang

tergabung dalam KNIL. Orang-orang Maluku yang bergabung dalam KNIL dan keluarganya ini menolak untuk mengakui identitas orang Indonesia dan hanya mengakui diri mereka sebagai orang Maluku (Gusnelly, 2014). Di samping itu, kondisi lain yang terjadi adalah Belanda perlu melepaskan tentara KNIL yang tersisa di Indonesia, tetapi Kejaksaan Belanda melarang pemerintah untuk melepaskan status para tentara di luar negeri padahal Jawa sudah menjadi bagian dari Indonesia saat itu. Oleh karena itu, sebanyak 12,500 orang Ambon/Maluku berstatus tentara KNIL dan keluarganya dibawa ke Belanda dan diasingkan di sebuah perkemahan militer (van Amersfoort, 2007).

Alih-alih orang-orang Maluku dijanjikan untuk dipulangkan kembali oleh Pemerintah Belanda, sampai tahun 1970-an, nasib mereka belum jelas dan konflik sebagai bentuk resistensi orang-orang Maluku pun terjadi dalam bentuk terorisme dan pembunuhan. Konflik antara orang Maluku kepada Pemerintah Belanda saat itu cukup merisaukan masyarakat setempat dan menjadi sorot perhatian. Ini merupakan contoh studi kasus yang menarik pada diaspora Indonesia dalam pengertian diaspora berkumpul karena kesamaan latar belakang mereka sebagai orang-orang Maluku, mantan tentara KNIL yang berpindah ke Belanda karena adanya rasa ketidaksetujuan atas kemerdekaan dan perlunya pelepasan status dilakukan di Belanda menurut hukum Belanda, kemudian berkumpul dan berkelompok serta merasakan perasaan yang sama dalam memperjuangkan nasib dan status mereka di Belanda. Pembahasan mengenai diaspora yang terbentuk karena adanya konflik menjadi bagian yang sangat menarik. Hal ini juga mengingatkan sejarah diaspora dunia yang berawal dari perpindahan orang-orang Yunani akibat konflik, meskipun dengan cerita yang berbeda.

DIASPORA DAN GLOBALISASI

Pembahasan terkait diaspora dan globalisasi menjadi bagian yang juga sangat menarik dan menjadikan kajian dalam buku ini beragam. Sebagian besar kajian yang dibahas pada buku tidak terlepas dari konsekuensi fenomena globalisasi, sehingga perpindahan orang menjadi

semakin cepat dan motif perpindahan pun bermacam-macam. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena teknologi informasi dan transportasi yang semakin canggih, sehingga memudahkan manusia berpindah dan terkoneksi satu sama lain. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk yang bermigrasi ke luar negeri semakin banyak karena globalisasi. Akibatnya, fenomena *brain drain* atau semakin sedikitnya generasi muda yang potensial dan berpendidikan yang tetap tinggal di tanah air terjadi, akan tetapi beberapa tahun terakhir berkembang istilah *brain gain* di mana urgensi dalam mengoptimalkan kemampuan dan tenaga profesional para diaspora sebagai pendukung dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing bangsa, dan produktivitas di negara asalnya semakin meningkat. Hal ini disadari oleh pemerintah-pemerintah negara asal para diaspora, termasuk pemerintah Indonesia tentang perlunya mempererat hubungan dengan para diaspora dan menggali potensi yang ada untuk pembangunan negara dan bangsa. Menurut Muhidin dan Utomo (2015), terdapat lima potensi yang dapat diberikan oleh diaspora kepada negara asalnya, yakni remitansi, investasi asing langsung, diaspora dapat menjadi jembatan dalam perluasan hubungan ekonomi negara asal, jejaring diaspora untuk layanan jasa profesional tanpa biaya, dan kepekaan diaspora untuk pembangunan negara asal. Kelima hal ini perlu dimaksimalkan tidak hanya untuk peningkatan aspek ekonomi negara, tetapi juga membantu peningkatan daya saing bangsa serta kualitas sumber daya manusia di negara asal.

Aspek remitansi dapat dikatakan menjadi hal yang paling identik dengan kontribusi yang diberikan oleh diaspora untuk negara asalnya. Remitansi yang semula hanya dikaitkan dengan ekonomi atau pengiriman uang ke negara asal, kini berkembang ke berbagai bentuk pengiriman lainnya. Levitt (1998) menjelaskan perkembangan konsep remitansi ekonomi ke remitansi sosial. Dalam hal ini, migran tidak hanya mengirimkan uang tetapi juga ide, perilaku, identitas, dan modal sosial yang mengalir dari negara pengirim ke negara asal. Sementara itu, Müller-Funk (2019) melengkapi dengan pengertian remitansi politik yang berarti para migran kini memiliki tujuan untuk memperoleh kekuatan politik atau

memberikan pengaruh politik terhadap tanah airnya ketika berada di luar negeri. Buku ini juga menawarkan konsep baru dalam remitansi, di samping ekonomi, sosial, dan politik, yakni remitansi kolektif. Remitansi kolektif dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi dari kontribusi berganda yang diberikan oleh para diaspora di mana melalui proyek pembangunan, mereka memperlihatkan kesetiaan pada negara, dan mentransfer kemampuan mereka untuk membuat suatu kebaruan di negara asalnya (Lacroix, 2019). Dalam remitansi kolektif, proyek pembangunan adalah bentuk kontribusi paling nyata, seperti pada pembangunan gedung sekolah, pemukiman, dan pusat kesehatan. Dalam hal ini, diaspora tidak hanya menunjukkan kesetiaannya, tetapi juga kapasitas mereka untuk mentransfer ilmu dan tenaga profesional kepada negara asal. Dengan kata lain, remitansi kolektif merupakan hasil dari penempatan ganda yang dilakukan oleh para diaspora terhadap negara asal dan negara tempat mereka tinggal (Lacroix, 2014).

Mengkaji Indonesia, menurut Romdiati (2015), kontribusi diaspora Indonesia masih terbatas pada aspek remitansi dalam hal ini ekonomi, belum sampai pada sumbangan kapital dan sumber daya finansial, teknis, dan profesionalisme. Namun, melihat perkembangannya, Pemerintah Indonesia belakangan ini menaruh perhatian besar pada diaspora Indonesia dan mengupayakan berbagai upaya perekatan hubungan atau dalam buku ini disebut sebagai *diaspora engagement* untuk menanamkan bentuk-bentuk remitansi lainnya, terutama dalam remitansi sosial berbentuk ide-ide kreatif dan transfer pengetahuan, serta apa yang kini berkembang sebagai remitansi kolektif dimana bentuk kontribusi dapat dilakukan secara kolektif dalam organisasi tertentu sekaligus mewujudkan perasaan cinta tanah air dan membangun kegiatan-kegiatan dengan hasil yang terlihat nyata dan berguna bagi negara asal.

Konsep *hometown transnationalism* juga menjadi pembahasan menarik dan berkaitan erat dengan apa yang sedang dilakukan oleh diaspora Indonesia, yakni membentuk wadah yang bernaung dalam memaksimalkan kontribusynya kepada tanah air. Remitansi kolektif menjadi pasangan paling sesuai dengan konsep ini jika membicarakan hasil nyata yang diharapkan dengan

adanya perkumpulan diaspora yang terorganisir. Dalam buku ini, Lacroix (2019) mengartikan *hometown transnationalism* sebagai ikatan dan praktik yang dipelihara oleh organisasi ekspatriat dengan negara asalnya. Namun, sebelumnya Lacroix (2016) dalam bukunya yang berjudul "*Hometown transnationalism: long distance villageness among Indian Punjabi and North African Berbers*" telah mendefinisikan *hometown transnationalism* sebagai institusi-institusi sosial tempat para migran berusaha secara kolektif untuk mengartikulasikan kembali koherensi diri dengan tempat asalnya sejak berpisah dan mengupayakan untuk tetap menjadi penduduk tempat tersebut ketika bahkan tempat itu sudah berubah secara radikal. Dalam konteks ini, tempat yang dimaksud adalah negara asal. Menambahi kedua definisi tersebut, Lacroix (2016) dalam bukunya juga menyatakan bahwa jaringan kampung halaman dapat menjadi instrumen potensial dalam pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran bahwa organisasi diaspora seringkali diharapkan dan dipercaya sebagai salah satu motor penggerak pembangunan di negara asal.

Dalam konteks Indonesia, organisasi diaspora yang kini sedang berkembang adalah *Indonesian Diaspora Network (IDN)*. Organisasi ini merupakan salah satu perwujudan dari *hometown transnationalism*. IDN terbentuk dan berkembang dengan motivasi mengoneksikan diaspora-diaspora Indonesia di luar negeri untuk sama-sama berkontribusi pada tanah air. Perkumpulan ini diprakarsai oleh Dino Patti Djalal selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri dengan mengundang seluruh diaspora Indonesia di luar negeri dalam Kongres Diaspora Indonesia yang pertama pada tahun 2012 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pertemuan besar ini menghasilkan kesepakatan pembentukan IDN yang mengumpulkan para diaspora dan memprakarsai ide-ide untuk pembangunan negara. Pada kongres yang kedua di tahun 2013, pertemuan menghasilkan beberapa gugus kerja sebagai bentuk komitmen dengan pemerintah, diaspora Indonesia, dan badan-badan lain yang nantinya terlibat. Gugus kerja tersebut bergerak di bidang energi, ketenagakerjaan, imigrasi, kewarganegaraan, pendidikan, sains

dan teknologi, perkotaan layak huni, ekonomi hijau, kesehatan publik, bisnis, investasi, industri dirgantara, pemuda, dan masakan khas Indonesia (Narottama & Sudarmawan, 2017). Dengan adanya wadah yang terorganisasi ini, diharapkan semangat diaspora Indonesia untuk berkontribusi juga semakin besar.

IDN terus berkembang dan memiliki cabang-cabang di berbagai belahan dunia di mana para diaspora Indonesia tinggal, salah satunya adalah IDN Belanda yang di dalamnya terdapat beberapa gugus kerja yang berfungsi untuk merumuskan visi misi yang perlu diwujudkan sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa terkadang terjadi bias antara kontribusi sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan adanya kepentingan tertentu dari proyek-proyek yang ingin diwujudkan di negara asal. Salah satu kelompok kerja yang kini berkontribusi aktif dalam pembangunan Indonesia adalah kelompok kerja *Liveable Cities* atau yang dikenal dengan *Taskforce Liveable Cities*. Kelompok kerja ini cukup aktif dalam membangun koneksi dan proyek-proyek pembangunan kota dengan pemerintah daerah. Sejauh ini sudah cukup banyak proyek pembangunan di Jakarta dan Bandung yang dihasilkan berdasarkan kerja sama dengan IDN Belanda *Taskforce Liveable Cities*. Di sini, bentuk remitansi sosial dan remitansi kolektif terlihat pada kontribusi diaspora Indonesia dalam bentuk proyek-proyek pembangunan dengan kerja sama dengan pemerintah daerah. Para diaspora Indonesia tidak hanya kembali menunjukan kesetiaan pada bangsa, tetapi juga memberikan inovasi-inovasi baru dan mengimplementasikan ilmunya ke dalam bentuk proyek nyata untuk pembangunan Indonesia di bidang tata kota.

IDN merupakan contoh menarik dalam perkembangan studi diaspora dengan konsep *hometown transnationalism*. Terlebih, di era globalisasi, penting untuk menggali potensi-potensi anak bangsa yang sudah mengenyam pendidikan dan bekerja di luar negeri untuk mengimplementasikan ilmunya untuk negara. Penguatan sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu tujuan Pemerintah Indonesia, sehingga perlu adanya dukungan dari para diaspora untuk mentransfer pengetahuan

untuk anak-anak bangsa di Indonesia. Selain itu, pembangunan juga merupakan fokus negara di mana para diaspora dapat menjadi salah satu aktor dalam membangun negara dari aspek yang berbeda dengan inovasi-inovasi yang diberikan, seperti contohnya apa yang telah dilakukan oleh gugus kerja *Liveable Cities* dalam tata kelola di beberapa kota di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa globalisasi benar adanya membawa pengaruh dalam pola interaksi yang dilakukan oleh para diaspora dan juga pola tingkah laku negara asal yang menyadari pentingnya diaspora untuk tanah air. Tidak heran bahwa dalam buku ini, globalisasi banyak sekali diperbincangkan dan dihubungkan dengan perkembangan studi diaspora.

PENUTUP

Melihat perkembangannya, buku ini berhasil menyajikan sebuah kumpulan tulisan yang bersifat multidisiplin dan menunjukkan bahwa konsep diaspora terus berkembang serta memiliki penafsiran yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Meskipun konsep diaspora masih terus diperbincangkan dan dikembangkan, tetapi dalam merespon fenomena globalisasi, diaspora menjadi sebuah konsep positif yang menggambarkan hubungan antara diaspora dan negara asal penting untuk terus dibangun agar kepentingan pembangunan dapat direalisasikan dengan baik.

Selain itu, buku ini terbit sebagai buku terbitan terbaru di tahun 2019, sehingga berhasil menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada pola interaksi diaspora dengan ilustrasi menggunakan studi kasus kontemporer. Salah satu contohnya adalah diskusi terkait diaspora dan agama pada salah satu bab dalam buku. Diaspora Muslim yang dijelaskan di sini dicontohkan dengan menggunakan studi kasus kebijakan terkini Donald J. Trump terkait pelarangan masuknya imigran dari negara-negara Islam (*the Muslim ban*) yang secara jelas telah melanggar *the USA Immigration and Nationality Act* tahun 1965 yang menyatakan tidak ada satupun orang yang dapat didiskriminasi dalam pemerolehan visa hanya karena suku, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat lahir, dan tempat tinggal. Keterkinian ide dan contoh yang diambil pada buku ini menjadi

nilai tambah ketika membaca dan mempelajari konsep diaspora.

Namun, kelengkapan pada buku berbentuk bunga rampai ini sebenarnya menimbulkan tumpang tindih dalam konsep dan pembahasan. Kadang kala terdapat pembahasan yang berulang walaupun tidak menjadikan buku ini membosankan untuk dibaca karena pada akhirnya, pendalaman konsep atau tujuan penelitian yang ditawarkan berbeda satu sama lain pada setiap babnya. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para akademisi dan peneliti yang akan memulai penelitian terkait diaspora. Berbagai penafsiran diaspora, sejarah perkembangan, dan studi kasus pendukung dapat membantu pemahaman para pembaca dalam mengenal diaspora sebagai sebuah studi yang terus berkembang. Buku-buku terdahulu yang berjudul “*Diasporas*” karya Stephane Dufoix dan “*Global Diasporas: an introduction*” karya Robert Cohen juga direkomendasikan untuk dapat menjadi pengantar dalam memahami konsep diaspora dan sejarah perkembangannya.

PUSTAKA ACUAN

- Cohen, R. (1997). *Global diasporas: an introduction* (1st ed). London, Inggris: UCL Press.
- Cohen, R. (2008). *Global diasporas: an introduction* (2nd ed). Abingdon, Inggris: Routledge.
- Cohen, R. & Fischer, C. (Eds). (2019). *Routledge Handbook of Diaspora Studies*. New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Dufoix, S. (2019). Diaspora before it became a concept. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 13-21). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Dufoix, S. (2008). *Diasporas*. California, Amerika Serikat: University of California Press.
- Faist, T. (2010). Diaspora and transnationalism: what kind of dance partners?. Dalam R. Bauböck and T. Faist (Eds). *Diaspora and transnationalism: concepts, theory and methods* (hal 9-34). Amsterdam, Belanda: Amsterdam University Press.
- Gusnelly. (2014). Dinamika konstruksi dan perubahan identitas kultural orang Maluku di Belanda. Dalam Devi R (Ed.), *Studi Dinamika Identitas di Asia dan Eropa* (hal. 1-33). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Obor.
- Lacroix, T. (2014). Conceptualizing transnational engagements: a structure and agency perspective on (hometown) transnationalism. *International Migration Review*, 48(3), 643-679.
- Lacroix, T. (2019). Unravelling the conceptual link between transnationalism and diaspora: the example of hometown networks. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 173-180). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Levitt, P. (1998). Social remittance: migration driven local-level forms of cultural diffusion. *International Migration Review*, 32(4), 926-948.
- Missbach, A. (2019). Moral comforts of remaining in exile: snapshots from conflict-generated Indonesian diaspora. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 197-205). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Müller-Funk, L. (2019). Diaspora politics and political remittances: a conceptual reflection. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 251-259). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Muhidin, S. & Utomo, A. (2015). Global Indonesian Diaspora: How many are there and where are they?. *Journal of ASEAN Studies*, 3(2), 93-101.
- Narottama, N. & Sudarmawan, E. (2017). The Indonesian diaspora in Europe: Culinary as cultural identity and tourism promotion in Paris, France. *Advances in Economics, Business, and Management Research*, 28, 50-56.
- Quinsa, S.M. (2019). Diaspora as social movements?. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 47-54). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Romdiati, H. (2015). Globalisasi migrasi dan peran diaspora: suatu kajian pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89-100.
- Safran, W. (1991). Diaspora in modern societies: myths of homeland and return. *Journal of Transnational Studies*, 1(1), 83-99.
- Tölölyan, K. (2019). Diaspora studies: past, present, and promise. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 22-30). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Turner, S. (2019). The social construction of diaspora: conceptual development and the Rwandan case. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 40-46). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Van Amersfoort, H. (2007). The waxing and waning of a diaspora: Moluccans in the Netherlands, 1950–2002. *Journal of Ethic and Migration Studies*, 30(1), 151-174.

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

